

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Setiap di dalam daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa.¹

Desa atau sebutan lainnya seperti nagari, marga, kampong, dusun, dati dan sebagainya merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Berdasarkan perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.²

Desa merupakan suatu sistem sosial dengan lembaga sendiri di mana desa memiliki lembaga politik, ekonomi, peradilan, dan sosial-budaya yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya dalam lembaga politik, desa mempunyai Kepala desa dan Perangkat desa yang tata cara dan pengaturan tugas pokok dan fungsinya dikembangkan sendiri berdasarkan inisiatif masyarakat desa sendiri, bukan berdasarkan instruksi dari pemerintah di atasnya.³

Pemilihan Kepala desa berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan

¹ Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*". (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011) 1

² Maschab Mashuri, "*Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*", (Yogyakarta: PolGov, 2013), 2

³ Hanif Nurcholis, "*Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*".12

- perda yang berpedoman kepada peraturan Pemerintahan.
2. Calon Kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
 3. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan pemerintah.⁴

Pemilihan Kepala desa merupakan hak mengurus dan mengatur politik rakyat lokal pedesaan dan proses mensejahterakan rakyat dalam konsep penyelenggaraan otonomi desa. Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah menambah semaraknya peran mereka dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi.⁵

Teori demokrasi mengajarkan bahwa demokrasi membutuhkan hadirnya masyarakat sipil yang terorganisir secara partisipatif. Partisipasi merupakan faktor utama dalam masyarakat sipil yang menghubungkan antara rakyat biasa dengan pemerintah. Persyaratan dalam pilkades, meskipun sesungguhnya dalam politik di tingkat terendah yaitu desa partisipasi bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan BPD, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan keseharian yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintah desa.

Sosok ulama bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagaman masyarakatnya. Ulama tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Oky Vanzelen, "Strategi kampanye kepala desa terpilih desa danau rata tahun 2013 (Studi Pada Kepala Desa Terpilih Siswanto di Desa danau Rata Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan)", (*Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 2016*) diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pada masyarakat tradisional biasanya ulama menjadi tempat untuk meminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilhkan waktu untuk memulai suatu pekerjaan hingga soal-soal politik. Karena kemampuan agamanya yang cukup tinggi, maka ulama ditempatkan sebagai sosok “guru” baik dalam ilmu bathin (esoterik) maupun ilmu zahir (eksoterik). Jika dilihat dari sejarahnya, bahwa gelar ulama memang tidak mudah untuk didapat.⁶

Kedudukan sosial ulama dianggap cukup tinggi, sehingga ulama termasuk elit agama dan tokoh agama yang eksistensinya selalu diperhitungkan. Sebagai tokoh agama, ulama berada dalam posisi yang memiliki kharisma akibat hubungan strata sosial yang tetap dipertahankan dalam komponen masyarakat. Suzanne Keller memposisikan tokoh sebagai elit penentu sekaligus sebagai obyek sosial, sehingga berada dalam kondisi tiga hal: pertama, mempunyai wewenang dan pengambil keputusan, kedua, sebagai pendukung kekuasaan moral, dan ketiga, sebagai orang yang terkenal, berhasil dan berderajat. Seorang tokoh dituntut untuk berhasil dalam mengembangkan suatu citra umum yang memudahkan hubungan timbal balik yang bersifat simbolis antara tokoh agama dengan masyarakat. Tokoh agama dapat juga ditempatkan sebagai kolektif model dan cermin dari ambisi, harapan dan pergolakan masyarakat.⁷

Potret sejarah kelahiran bangsa ini tampaknya sarat dengan tampilnya agama dalam ruang politik. Agama tidak sekadar diposisikan secara sakral dengan segala ritualistik simbolik di dalamnya, namun juga diorientasikan kepada “nafas” kehidupan berpolitik di Indonesia. Agama dengan demikian menjadi variabel penting yang memengaruhi kehidupan politik di Indonesia.⁸ Wajah agama, dalam hal ini wajah Islam pada masa pembentukan Negara Indonesia, bukan tampil dengan wajah formalis, melainkan wajah Islam politik yang mengedepankan nilai dan substansi universal, Hal inilah yang membuat Pancasila

⁶ Hasanatul Jannah, “Kyai, Perubahan Sosial, dan Dinamika Politik Kekuasaan” *Jurnal Fikrah Volume 3 Nomor 1 tahun 2015*, 158

⁷ Suzanne Killer, *Penguasa dan Kelompok Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 213.

⁸ Hakim Syah, Politik dalam Persepsi Ulama Kota Palangkaraya, *Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 15 Nomor 29 Januari-Juni 2016*, 63.

terterima oleh mayoritas tokoh ulama dan umat Islam serta mereka dengan rela hati menyetujui penghapusan deapan kata pada piagam Jakarta.

Beranjak dari historitas politik Islam di Indonesia, ulama sudah dari dulu terlibat dalam perpolitikan. Ulama tidak terpisah dari urusan politik yang hanya mengurus kepentingan akhirat saja. Setidaknya ada tiga alasan mengapa Ulama selalu terlibat dan tidak terlepas dari politik.¹⁶ Pertama, bahwa sumber ajaran Islam memiliki lingkup yang tak terbatas pada aspek ritual dan bimbingan moral, melainkan juga memberikan nilai-nilai pada semua sisi kehidupan baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial dan juga menyangkut persoalan politik. Kedua, dengan posisi atau kedudukannya sebagai (elit) pemuka agama, ulama memiliki pengikut dan pengaruh yang sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan Kiai terlibat dalam persoalan pengambilan keputusan bersama, proses kepemimpinan, penyelesaian problem-problem sosial serta pengembangan pendidikan dan ekonomi. Ketiga, dilihat dari sisi sejarah, Kiai memiliki peran yang cukup besar dalam politik. Hal tersebut dapat dilihat dalam pergolakan melawan penjajahan hingga beberapa masa kemudian setelah kemerdekaan RI diproklamasikan.

Ulama sebagai politikus sekarang ini menjadi hal yang biasa karena pada dasarnya, pendiri bangsa Indonesia pun banyak tokoh yang bergelar ulama sehingga perannya di dunia politik menjadi kewajaran belaka. Hal yang menjadi keresahan adalah bahwa ulama yang lalai akan statusnya sebagai ulama. Ulama yang seharusnya mempunyai karakter agamis, malah melupakan nilai-nilai moralitas keagamaan. Bahkan lebih parah lagi, menjual dalil-dalil kitab suci dengan harga yang murah hanya demi kepentingan partai politiknya. Padahal, dalil-dalil tersebut merupakan sakralitas dalam ajaran agama, bukan sesuatu yang bersifat profan. Dengan demikian, luntur pula sakralitas teks-teks keagamaan sehingga menjadi profanitas murahan.⁹ Kehadiran sosok ulama hendaknya menjadi teladan bagi elit politik yang lain, juga kepada umat manusia di Indonesia khususnya. Ulama adalah sosok yang dikenal 'alim (berlimu) dan mempunyai moralitas yang baik. Dengan kehadiran ulama seharusnya bisa

⁹ Muhammad Amin MS, *Mengislamkan Kursi dan Meja: Dialektika Ulama dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) ,86

mewarnai politik kekuasaan menjadi harmonis, bukan malah menambah kontras permusuhan antargolongan atau antarpantai.

Hubungan ulama dengan umara yang mana Ulama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan, dan Posisi ulama disini sebagai imam bagi masyarakat secara keseluruhan dalam membangun sosial keagamaan. Lalu umara¹⁰ (penguasa) adalah pemimpin dalam lingkup Negara (pemerintahan) yang memberikan kesejahteraan masyarakat melalui keputusan dan kebijakan secara adil dan demokratis, keduanya ialah samasama sebagai pemimpin dalam menjalankan tujuan yaitu memberikan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk rohani maupun jasmani.¹⁰ Pemerintah membutuhkan bantuan ulama, utamanya sebagai penasihat juga sebagai sumber mendapatkan berbagai keputusan yang dilandasi oleh hukum agama. Sedangkan ulama, membutuhkan umara, untuk mendukung aktivitasnya dalam berbagai bidang seperti halnya peradilan, pendidikan, kesufian, bahkan sampai hal-hal strategis lainnya seperti membangun pondasi masyarakat berahlak mulia.¹¹

Hubungan yang dibangun antara ulama dan umara¹⁰ pada saat ini khususnya di negeri Indonesia dalam masa pemerintahan bapak Jokowi, banyak sekali mendapat kritikan dari masyarakat. Karena hubungan yang dijalankan tidak saling berkesinambungan antara pemimpin dengan ulama melainkan dari kedua belah pihak ulama dan umara¹⁰ memiliki ideologi yang didasari oleh kepentingan politik, sehingga apa yang seharusnya digagas oleh umara¹⁰ maupun ulama berjalan tidak sesuai dengan garis lurus tujuan mereka. Pada saat ini realitasnya ulama ikut berperan dalam kancah perpolitikan dengan menggunakan armada sendiri yang ber-azaskan syariat Islam melalui partai politik, organisasi masyarakat, dan komunitas-komunitas lainnya, hal ini dikarenakan ada persaingan antara ulama dengan penguasa dalam mencapai suatu kekuasaan.¹²

¹⁰ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, 12.

¹¹ Gazali, *Interaksi Umara dan Ulama dalam Menata Kehidupan Sosio-Keagamaan di Aceh Darussalam Era Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2016), 5

¹² Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pusat Obor Indonesia, 2012), 105.

Namun umara¹³ pada saat ini juga tidak lagi mementingkan arahan nasihat dari para ulama secara deskriptifnya bahwa umara¹³ dalam menjalankan roda pemerintahan sedikit tidak menghiraukan nasihat dari ulama yang mana di Indonesia asaz ber-agama ialah sebagai dasar atau cermin dalam melaksanakan kekuasaan yang demokrasi di Indonesia melalui peran dari ulama. Sehingga ulama sangat berperan dalam mencapai kesejahteraan sosiokeagamaan di Indonesia, sosok ulama dan pemimpin sangat dibutuhkan dalam proses mencapai kesejahteraan sosial jika keduanya rusak dalam menjalin komunikasi yang baik maka dampak akan tertuju kepada masyarakat.

Tentang pemaparan ulama diatas yang dimaksudkan ialah ulama duniawi, yaitu Ulamaus-su¹³, yang tujuan mereka dengan ilmunya adalah untukmendapat kepuasaan duniawi dan sebagai lantaran mencari kedudukan disisi ahli dunia (pemimpin). Setiap warga negara memiliki hak untuk memperhatikan kehidupan politik negaranya. Masyarakat sebagai warga negara dapat memberikan kritik terhadap penyelenggaraan negara. Anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai sistem politik dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Selama ini masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi yaitu dalam proses pemilihn umum. Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah masih memandang bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan karena sudah terwakili di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Asumsi ini menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat untuk melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun demikian tidak semua anggota masyarakat mampu berpartisipasi dalam politik/pemerintahan. Secara teoritik budaya politik (orientasi politik) individu dibentuk melalui proses sosialisasi politik.¹³

Kecenderungan tersebut juga terjadi pada arena politik lokal, daerah. Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati ataupun gubernur, juga tak henti berupaya

¹³ Wolter, A.,Rosenbaum,. *Political Culture*, (Princeton. Praeger:1975),

melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kyai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kyai atau tokoh-tokoh pesantren tertentu menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kyai terbelah kepada beberapa calon berbeda. Dalam beberapa kasus hal ini bahkan diwarnai ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai berbasis NU dengan mereka yang berada pada jajaran pengurus Ormas.

Kecenderungan menarik dukungan kyai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahkan nilai politik kyai di hadapan para politisi dalam 12 upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. Komunitas elit keagamaan ini, meminjam istilah Masdar, masih dipercaya mampu memberikan sumbangan signifikan bagi sukses tidaknya sebuah misi politik kelompok politik maupun perorangan. Padahal terbelahnya afiliasi politik kyai pada politik partisan tentunya menimbulkan persoalan berkenaan dengan sikap kaum santri yang sebelumnya dikenal memiliki respekasi dan ketaatan tinggi pada kyai.

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat dan sosialisasi politik secara komunikasi politik yang baik dari para bakal calon Kepala desa mengenai visi dan misi atau program kerja yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi politik akan dilakukan jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilihan berlangsung, dengan cara yang sangat menegangkan, panas, penuh dengan teknik, teror dan syarat dengan modal (politik uang). Umumnya, para calon Kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang sangat kuat, solid dan kompak serta memiliki modal uang paling memiliki potensi yang besar untuk memenangkan sebagai kepala desa.¹⁴ Para bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. Seperti halnya di desa Kajen yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebagai wujud pesta

¹⁴ Riko hardiono Padang, "Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pada Keala Desa Terpilih Rumbin Sitio di Desa Tenggana Kecamatan Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2017), (*Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2018*), diakses pada tanggal 25 Desember 2021.

rakyat. Sehingga dalam pemilihan kepala desa ini, masyarakat di Kajen memilih Kepala desa untuk periode 2021-2026.

Desa Kajen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kajen adalah potret sebuah desa unik, walaupun tidak mempunyai sawah-sawah seperti desa-desa yang lain. Kepadatan penduduk dengan jumlah kepala keluarga tidaklah banyak sebagaimana desa semestinya, dikarenakan luas desa hanya 64 Ha di atas permukaan laut di lereng pegunungan dekat dengan gunung Muria. Secara ekonomi, masyarakat Kajen bisa dikatakan kecukupan bahkan hampir setiap tahunnya mereka yang menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan. Kesibukan yang mereka miliki sebagian besar adalah pedagang, hal ini didukung dengan keberadaan santri yang jumlahnya ribuan.¹⁵

Masyarakat Kajen pada pemilihan Kepala desa menunjukkan bahwa masyarakat kajen adalah masyarakat yang sangat aktif dalam pelaksanaan demokrasi khususnya pemilihan Kepala desa. Masyarakat Kajen mempunyai keterbukaan sikap terhadap partisipasi pelaksanaan pemilihan Kepala desa. Hanya saja memang bagaimana keterlibatan itu sangat dipengaruhi oleh arahan dan perintah para elit agama desa tersebut. Elit politik yang berpengaruh antara lain tokoh-tokoh kiai NU yang sangat aktif terhadap kemengangan kaditat terpilih, karena hidup dalam lingkungan pondok pesantren yang dinaungi oleh para tokoh NU. Selain tokoh elit politik ada juga kelompok preman desa yang juga berpengaruh besar terhadap kemenangan kaditat terpilih karena sosial yang tinggi semua golongan disama ratakan terhadap kehidupan sehari-hari. Meskipun keterlibatan dalam proses politik dipengaruhi oleh elit agama, namun tidak mengurangi esensi partisipasi politik masyarakat dalam pilkades Kajen.

Elit secara terminologi menunjukkan pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang ekonomi dan politik. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa ada kemungkinan seseorang atau sekelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya juga mampu memperlakukan peran

¹⁵Kamaludin, Laode M, “*On Islamic Civilization*”, (Semarang: Unissula Press, Desember 2010), 41

yang menonjol dan berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan.¹⁶

Dalam pemilihan pemimpin kepala desa pada masyarakat Kajen merupakan upaya penting sebagai bagian dari upaya menitipkan diri terhadap pemimpin desa terpilih agar bisa menjaga kehidupan mereka. Jadi, ketika desa telah menentukan calon yang akan terpilih dalam Pilkades, masyarakat Kajen sebagai pemilih tidak takut pada pendukung masing-masing calon. Begitupun dengan calon kepala desa, adanya sisi kompetitif hanya karena mereka berada pada situasi yang harus dipilih bukan pada situasi harus menang. Pilkades Kajen telah menunjukkan sisi lain dari karakter demokrasi yang khas masyarakat desa.

Kesuksesan pemilihan kepemimpinan di desa Kajen ini, selain menggunakan unsur kompetitif sebagai bagian penting dalam asas demokrasi juga sangat penting menentukan kompetensi calon berdasarkan adat dan nilai-nilai yang dianut masyarakat desa. Desa kajen beberapa bulan yang lalu tepatnya pada Tanggal 10 April 2021 juga melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan kepala desa yang dilakukan 5 tahun sekali tersebut, diwarnai dengan banyaknya kandidat yang mencalonkan diri sejumlah 5 orang yakni (1) Burhanuddin, S.H, tokoh masyarakat biasa yang di usung oleh mantan kepala desa (2) Ibnu Khoidar anak dari tokoh agama desa kajen (3) Budiono masyarakat biasa (4) Samsul Bakri ketua linmas desa kajen (5) Ulil Amri tokoh masyarakat desa kajen. Hasil dari Pilkades tersebut yang mana dari pihak Burhanuddin, S.H memperoleh 789 Suara, Ibnu Khoidar 1021 suara, Budiono 565 suara, Samsul Bakri 107 suara dan Ulil Amri 402 suara. Data partisipasi masyarakat desa Kajen dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa terdiri dari jumlah hadir 81,60%. Berdasarkan hasil tersebut Pilkades kajen 2021 dimenangkan oleh Bapak Ibnu Khoidar dengan memperoleh 1021 suara. Dengan terlaksananya pemilihan umum dari tingkat nasional sampai daerah di Indonesia, menjadi salah satu bukti bahwa perilaku demokrasi telah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Haryanto, *Elit, massa dan kekuasaan : suatu bahasan pengantar*, (Yogyakarta, PolGow, 2017), 6

¹⁷ Wawancara dari Bapak Purnomo selaku BPD desa Kajen , Senin, 26 April 2021 jam 19.00 WIB.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Peran Elit agama dalam Pemenangan Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati 2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Elit agama dalam Pemenangan Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat pemenangan Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana menerapkan Peran Elit agama dalam Pemenangan Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendorong dan penghambat dalam Pemenangan Kepala Desa Kajen Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis
 - a. Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi ilmu politik.
 - b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui strategi politik pilkades desa Kajen.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih dan menentukan kepala daerah guna terciptanya interaksi politik yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat selanjutnya.
 - b. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga kehidupan berpolitik

masyarakat lebih baik kedepannya, terutama dalam membentuk sikap dan tingkah laku politik mereka.

E. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing maupun yang saling berhubungan, sehingga nanti akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari: halaman judul, pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar

2. Bagian isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan deskripsi teori-teori yang menjadikan landasan dalam kegiatan penelitian yang mencakup tentang kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan beserta dengan pembahasannya

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

